

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah kuasi kualitatif, dimana penggunaan teori masih dimungkinkan sebagai alat penelitian sejak menemukan masalah, pengumpulan data, sampai pada analisis data. Bentuk penelitian menurut taraf analisisnya adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang. Tujuannya adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab gejala tertentu. Hasil yang diperoleh adalah data yang representatif, guna mengambil tindakan atau keputusan lebih lanjut.

Metode penelitian yang dipakai termasuk di dalam penelitian penilaian atau *Evaluation Research*. Penelitian Penilaian bertujuan untuk memberikan informasi (*useful feedback*) guna pengambilan keputusan. Hasil penelitian evaluasi dapat dipergunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan sebuah program atau kebijakan. Metode ini dapat digunakan untuk melihat apakah suatu aktivitas telah atau belum mencapai tujuan-tujuan seperti yang ditetapkan sebelumnya. Secara umum, metode yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian diuraikan di dalam Tabel 4.

Tabel 4. Metode untuk Menjawab Tujuan Penelitian

No.	<u>Tujuan Khusus Penelitian:</u>	Metode
1.	Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi lambannya pelaksanaan CDM di Indonesia.	Studi literatur, wawancara terarah dan mendalam dengan para pakar, pelaku dan regulator CDM, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Tabel 4. (Lanjutan)

2.	Mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang mempengaruhi lambannya pelaksanaan CDM di Indonesia.	Studi literatur, wawancara terarah dan mendalam dengan para pakar, pelaku dan regulator CDM, serta LSM.
3.	Menganalisis apakah pemerintah sudah melakukan upaya optimal dalam mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari CDM.	Studi literatur dengan metode analisis komparasi, dilanjutkan dengan wawancara terarah dan mendalam dengan para pakar, pelaku, regulator CDM, dan LSM, dengan metode analisis kebijakan.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah DKI Jakarta, berdasarkan keberadaan kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Komnas-MPB. Jakarta dipilih juga karena keberadaan informan lainnya yaitu para pakar perubahan iklim atau CDM, LSM, serta perusahaan-perusahaan pengembang dan pemilik proyek CDM.

Waktu penelitian berlangsung mulai Agustus sampai dengan November 2008. Pada tahap ini selain dilakukan pengumpulan data sekunder dari studi literatur juga dilakukan pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara terarah dan mendalam.

3.3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah para ahli dalam bidang perubahan iklim dan/atau CDM, aparat pemerintah terutama yang bertugas di Komnas-MPB, para pelaku atau pemilik proyek CDM baik dari perusahaan swasta nasional maupun multi-nasional, dan LSM yang memiliki fokus pada perubahan iklim.

Jumlah informan ditargetkan antara 25-35 orang, terdiri atas 5-10 pakar perubahan iklim dan/atau CDM; 10-15 pelaku proyek CDM dari pihak swasta; 5 dari pihak pemerintah; dan 5 orang dari LSM.

Masing-masing informan dipilih dan ditetapkan menggunakan metode *purposive sampling*, dimana sampel dipilih oleh peneliti berdasarkan tujuan tertentu. Pemilihan informan didasarkan pada satu atau lebih kriteria pokok, yaitu: keahlian (*expertise*), keterlibatan (*involvement*), pengalaman (*experience*), serta dapat dipercaya (*accountability*). Adapun kriteria lengkap yang digunakan oleh peneliti dalam memilih informan adalah sebagai berikut:

- a. Kriteria Pakar: Berlatar belakang pendidikan di bidang iklim dan/atau bidang-bidang yang berkaitan erat dengan perubahan iklim dan upaya mitigasinya; atau memiliki keahlian di bidang iklim dan/atau CDM dengan reputasi nasional dan/atau internasional;
- b. Kriteria Pelaku Proyek CDM: Memiliki pengalaman di dalam menjalankan proyek CDM di Indonesia minimal 2 tahun dan/atau memiliki proyek CDM yang sudah disetujui oleh Komnas-MPB atau yang sedang berada di dalam proses seleksi;
- c. Kriteria Aparat Pemerintah: Bertugas di KLH di bidang perubahan iklim dan/atau di Komnas-MPB, atau instansi-instansi lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan CDM di Indonesia;
- d. Kriteria Informan dari LSM: Berasal dari LSM yang memfokuskan perhatiannya pada perubahan iklim dan/atau pelaksanaan CDM; dan/atau sudah melakukan penelitian atau kajian mengenai mitigasi perubahan iklim dan/atau pelaksanaan CDM di Indonesia.

3.4. Variabel Penelitian

Variabel di dalam penelitian ini meliputi:

- a. Jumlah CERs dari proyek CDM Indonesia.
- b. Aksi Pemerintah dalam pelaksanaan CDM.

Operasional variabel-variabel tersebut diuraikan di dalam Tabel 5.

Tabel 5. Matriks Variabel Penelitian dan Metodenya

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Unit	Metode
Jumlah CERs dari Proyek CDM Indonesia.	Angka ini adalah total <i>CERs</i> dari proyek CDM Indonesia yang terdaftar pada <i>Executive Board</i> .	CERs	Studi literatur
Aksi pemerintah dalam pelaksanaan CDM.	<p>Aksi ini adalah kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan CDM: semua keputusan yang dikeluarkan dan tindakan yang dijalankan untuk melaksanakan CDM, sesuai yang disyaratkan atau direkomendasikan oleh UNFCCC dan PK. Beberapa diantaranya adalah:</p> <p>a. Membentuk otoritas nasional (DNA) beserta kelengkapannya.</p> <p>b. Upaya-upaya berdasarkan pasal 4, UNFCCC, yang diantaranya adalah:</p> <p>b.1. Mengembangkan, memperbaharui secara berkala, dan menerbitkan inventarisasi nasional tentang sumber-sumber emisi antropogenik...</p> <p>b.2. Menyusun, melaksanakan, menerbitkan dan secara teratur melengkapi program-program nasional yang berisi tindakan-tindakan untuk mengurangi perubahan iklim...</p> <p>b.3. Memajukan dan bekerjasama dalam pembangunan, penerapan praktek-praktek dan proses yang mengendalikan, mengurangi, dan mencegah emisi antropogenik,...</p> <p>b.4. Memajukan dan bekerja sama dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan kesadaran masyarakat yang berkaitan dengan perubahan iklim, dan mendorong partisipasi seluas mungkin, termasuk organisasi nonpemerintah</p> <p>c. Melakukan penelitian dan pengamatan sistemik (berdasar pada pasal 5, UNFCCC)</p> <p>d. Melakukan pendidikan, pelatihan dan kesadaran masyarakat (berdasar pada pasal 6, UNFCCC)</p>	-	Studi literatur, komparasi, wawancara terarah dan mendalam, serta analisis kebijakan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara terarah dan mendalam. Wawancara dilakukan dengan semua informan yang tersebut pada sub bagian 3.3. Proses wawancara diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan CDM di Indonesia, serta faktor-faktor dominan yang menyebabkan pelaksanaan CDM di Indonesia cenderung lambat; terutama karena adanya batas waktu komitmen pertama, yang berakhir pada tahun 2012. Pertanyaan-pertanyaan juga diarahkan untuk mengetahui opini para pelaku proyek apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sudah optimum guna mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari CDM. Fokus wawancara yang lain adalah bagaimana CDM dapat mendukung pembangunan berkelanjutan.

Data sekunder diperoleh melalui studi literatur, yaitu teknik pengumpulan data dengan mendalami, mencermati, menelaah pengetahuan yang ada di dalam kepustakaan (dokumen resmi, buku-buku referensi, hasil penelitian lain). Studi literatur dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan CDM di Indonesia; dari kajian dan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, baik oleh para peneliti lainnya maupun yang dilakukan oleh berbagai institusi resmi yang ditunjuk oleh UNFCCC atau pemerintah Indonesia; seperti IPCC, Bank Dunia, *United Nations Development Program* (UNDP), IGES, Yayasan Pelangi, dan lain-lain.

Studi literatur juga dilakukan untuk mengetahui dan mendalami berbagai kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah Indonesia sehubungan dengan pelaksanaan CDM. Dokumen resmi yang dikaji diantaranya berasal dari UNFCCC, Protokol Kyoto, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan UNFCCC, dan Undang-undang No. 17 Tahun 2004 tentang Ratifikasi Protokol Kyoto.

3.6. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder, dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil-hasil studi literatur dan wawancara dikelompokkan dan ditabulasikan berdasarkan masing-masing faktor, untuk menjawab tujuan penelitian 1 dan 2.

Metode-metode analisis kebijakan yang dikembangkan oleh Dunn, digunakan untuk menjawab tujuan penelitian ketiga. Prosedur analisis yang meliputi langkah-langkah: Pemantauan (*Monitoring*), Peramalan (*prediction*), Evaluasi (*appraisal*), dan Rekomendasi (*Prescription*), akan digabungkan dengan teknik komparasi. Metode komparasi adalah aktivitas membandingkan dua atau lebih hal dengan tujuan untuk menemukan sesuatu tentang hal-hal yang diperbandingkan.

Prosedur analisis kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

(i) Pemantauan (*Monitoring*)

Langkah ini dilakukan untuk menghasilkan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan publik. Peneliti menganalisis hubungan antara kebijakan yang dijalankan dengan konsekuensi-konsekuensi atau hasil-hasilnya. Pemantauan adalah istilah lain yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan kebijakan publik. Analisis berangkat dari data yang terkumpul mengenai semua keputusan dan tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah sehubungan dengan pelaksanaan CDM. Langkah ini akan menghasilkan gambaran umum tentang upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah, hasil-hasilnya, serta penjelasan tentang keadaan sebelum dan sesudah kebijakan diadopsi dan dilaksanakan (*ex post facto*).

(ii) Peramalan (*Forecasting*)

Peramalan adalah suatu prosedur di dalam analisis kebijakan, yang ditujukan untuk menghasilkan informasi faktual tentang situasi sosial di masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. Hasil dari langkah pemantauan, yang adalah deskripsi dan penjelasan mengenai semua keputusan

dan upaya-upaya yang dilaksanakan pemerintah di dalam melaksanakan CDM, selanjutnya diramalkan akan seperti apa hasil dan konsekuensinya di masa depan, jika dilakukan perubahan kebijakan. Hal ini dapat dilakukan dengan bantuan data tentang kecenderungan masa lalu maupun masa kini. Dalam hal ini analisis juga akan diarahkan untuk menemukan nilai-nilai apa yang dapat dan seharusnya digunakan sebagai petunjuk untuk aksi-aksi ke depan.

(iii) Evaluasi (*appraisal*)

Langkah ini menghasilkan informasi tentang nilai atau kegunaan suatu desain dan pelaksanaan suatu kebijakan. Evaluasi mementingkan nilai (*values*), sedangkan pemantauan memusatkan perhatiannya pada fakta (*facts*). Secara sederhana evaluasi dapat didefinisikan sebagai penilaian kembali kegiatan-kegiatan yang telah berlalu sampai pada periode tertentu. Dalam tatanan analisis kebijakan, evaluasi berfungsi untuk memberi informasi yang bermakna mengenai kinerja kebijakan, memberi masukan, klarifikasi, dan kritik nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan sasaran kebijakan.

Dalam penelitian ini, metode evaluasi digabungkan dengan teknik komparasi. Hasil dari langkah pemantauan yang menggambarkan semua keputusan dan upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah sehubungan dengan pelaksanaan CDM, akan dibandingkan dengan tindakan-tindakan yang perlu atau harus dilakukan sesuai dengan yang disyaratkan atau direkomendasikan oleh UNFCCC dan PK. Hasil perbandingan kemudian digunakan sebagai bahan wawancara mendalam dengan para pakar, regulator dan pelaku CDM, serta LSM, untuk menjawab tujuan penelitian ketiga.

(iv) Rekomendasi (*Prescription*)

Perbandingan antara tindakan-tindakan yang disyaratkan atau direkomendasikan oleh UNFCCC dan PK dengan tindakan-tindakan yang sudah dijalankan oleh pemerintah, akan menghasilkan gambaran tentang tindakan-tindakan yang belum dan seharusnya dilaksanakan. Ini menjadi bahan dasar bagi pembuatan rekomendasi kebijakan.